

Jakarta; 2 Oktober/ October 2024

No. S.127/CCS/X/2024

Kepada Yth/To:

**Otoritas Jasa Keuangan**

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

**Otoritas Jasa Keuangan**

**Departemen Pengawasan Bank Swasta 1**

**Direktorat Pengawasan Bank Swasta 1**

**Deputi Direktur Pengawasan Bank Swasta 1.2**

Kompleks Perkantoran Bank Indonesia

Jl. M. Thamrin No. 2

Jakarta 10350

**Direksi PT Bursa Efek Indonesia**

Indonesian Stock Exchange Building, Tower I

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

**Perihal/Regarding: Keterbukaan Informasi yang perlu Diketahui Publik/  
Mandatory Disclosure of Information for Public**

Dengan hormat,

Dear Sir/Madam,

Memenuhi: (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Keterbukaan atas informasi atau fakta material oleh Emiten atau Perusahaan Publik; (ii) Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No. KEP-00066/BEI/09-2022 tanggal 30 September 2022 Perihal Perubahan Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi; dan (iii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, bersama ini kami menyampaikan laporan informasi atau fakta material sebagai berikut:

In compliance with: (i) The Regulation of Financial Services Authority Number 31/POJK.04/2015 dated 22 December 2015 regarding Disclosure of Information or Material Facts by Issuer or Public Company; (ii) The Decree of Board of Directors of Indonesia Stock Exchange No KEP-00066/BEI/09-2022 dated 30 September 2022 regarding the amendment to the regulation No I-E concerning the obligation to submit information; and (iii) The Regulation of The Financial Services Authority Number 37/POJK.03/2019 dated 19 December 2019 regarding Transparency and Publication of Bank Reports, we would like to report the following information or material facts as follows:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik/  
Name of Issuer or Public Company

: PT Bank SMBC Indonesia Tbk  
(d/h PT BANK BTPN Tbk)

Bidang Usaha/ Line of Business

: Perbankan/ Banking

Telepon/ Telephone

: 021 – 30026200

Faksimili/ Facsimile

: 021 – 30026309

Alamat surat elektronik/ email

: corporate.secretary@btpn.com

PT Bank BTPN Tbk

t. +6221 300 26 200

Menara BTPN

f. +6221 300 26 101

CBD Mega Kuningan, Jakarta 12950

www.btpn.com

- 1: Tanggal kejadian/ *Date of event* : 2 Oktober/ *October 2024*
2. Jenis informasi atau fakta material/ *Type of Information or material facts* : Informasi atau fakta material lainnya/ *Other information or material facts*
3. Uraian informasi atau fakta material/ *Description of information or material facts* : Merujuk pada:
  - (1) Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 29 Agustus 2024 yang telah menyetujui perubahan Anggaran Dasar mengenai perubahan Nama PT BANK BTPN Tbk ("Perseroan"), sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 43 tanggal 29 Agustus 2024 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-0054625.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 29 Agustus 2024;
  - (2) Surat Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor S-195/PB.31/2024 tanggal 24 September 2024 mengenai Rencana Perubahan Logo PT BANK BTPN Tbk;
  - (3) Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-73/D.03/2024 tanggal 25 September 2024 Tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT BANK BTPN Tbk menjadi atas nama PT Bank SMBC Indonesia Tbk;maka untuk memenuhi Pasal 91 ayat (5) dan 92 ayat (4) Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum. Perseroan mengumumkan **perubahan nama dan logo efektif pada tanggal 2 Oktober 2024** pada surat kabar harian Kompas dan the Jakarta Post yang terbit pada hari Rabu, 2 Oktober 2024 dengan bukti publikasi sebagaimana terlampir

*With reference to:*

- (1) *Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders held on 29 August 2024 which approved the amendment to the Articles of Association regarding the Name change of PT BANK BTPN Tbk (the "Company"), as stated in the Deed Number 43 dated 29 August 2024 made by Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn and has been approved by the Minister of Law and Human Rights by the Decree Number AHU-0054625.AH.01.02.Year 2024 dated 29 August 2024,*
- (2) *Letter from Indonesia Financial Services Authority/Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Number S-195/PB.31/2024 dated 24 September*

2024 in regards to the Logo change plan of PT BANK BTPN Tbk;

(3) The Decree of the Board of Commissioners member of OJK Number KEP-73/D.03/2024 dated 25 September 2024 in regards to the Determination of the Use of Business License in the Name of PT BANK BTPN Tbk to be in the name of PT Bank SMBC Indonesia Tbk;

That in compliance with Article 91 paragraph (5) and 92 paragraph (4) of OJK Regulation Number 12/POJK.03/2021 in regards to Commercial Bank, the Company announces **the changes of name and logo effective as at 2 October 2024** in daily newspapers namely Kompas and the Jakarta Post issued at Wednesday, 2 October 2024, with publication evidence as attached.

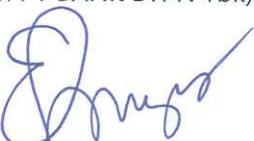
4. Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik/ *The impact of such event, information or material facts on the operational activity, legal, financial or business continuity of the Issuer of Public Company*

: Terdapat dampak atas perubahan ini pada dokumen atau produk Perseroan, bahkan bangunan kantor Perseroan yang masih menggunakan nama lama. Mitigasi dan perubahan yang diperlukan akan dilakukan secara bertahap.  
Layanan jasa Perseroan akan berjalan sebagaimana biasa dan tidak akan terdampak.  
*There is an impact of this change on the Company's documents or products, even the Company's office buildings that still use the old name. Mitigation and necessary changes will be carried out gradually. The Company's service will run as usual and will not be affected.*

5. Keterangan lainnya/ Other : -  
*informations*

Demikian informasi ini kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya. *Thus our information, thank you for your kind attention.*

Hormat kami/Regards,  
**PT Bank SMBC Indonesia Tbk**  
(d/h PT BANK BTPN Tbk)



**Eneng Yulie Andriani**  
Sekretaris Perusahaan/ Corporate Secretary

Tembusan/Cc:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II – Otoritas Jasa Keuangan
2. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa – Otoritas Jasa Keuangan
3. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
4. Wali Amanat

## Teknologi Dirgantara untuk Operasi Bantuan Kemanusiaan

Tony Harjono

Kepala Staf TNI Angkatan Udara

Dinamika global terus bergerak diwarnai ketegangan politik dan rivalitas antarnegara besar. Pada saat yang sama, ancaman bencana alam tidak boleh diabaikan karena dampaknya tidaklah destruktif.

Berada di cincin api Pasifik, Indonesia amat rentan terhadap bencana alam, seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, dan tsunami. Bencana hidrometeorologi, seperti banjir, puting beliung, dan keringanan, pun meningkat.

Situasi geografis dan dampak perubahan iklim mengharuskan Indonesia memiliki tingkat kesiapan tinggi dalam menanggah bencana.

Untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan memperkuat respons terhadap bencana sekaligus mendorong keamanan inklusif di kawasan, TNI Angkatan Udara (TNI AU) menggelar Regional Air and Space Power Forum untuk pertama kali di Nusa Dua, Bali.

Forum ini bertujuan memfasilitasi perkembangan teknologi dirgantara terkini dan masa depan yang relevan dengan operasi bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana atau *humanitarian assistance and disaster relief* (HADR).

Teknologi ini berfokus pada pengembangan *unmanned aerial vehicle* (UAV); platform mobilitas udara; *intelligence, surveillance, and reconnaissance* (ISR); dan teknologi satelit.

Bencana alam tidak mengetahui batas negara sehingga kolaborasi internasional dalam HADR menjadi penting. Bahkan, kolaborasi itu jadi jembatan antarnegara, terlepas dari perbedaan politik, demikian nilai-nilai kemanusiaan.

TNI sebagai pilar pertahanan negara, sesuai UU Nomor 34 Tahun 2004, berperan dalam operasi militer selain perang, termasuk operasi HADR. Hal ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana.

Selain kemampuannya bergerak cepat ke sejumlah wilayah, kekuatan udara TNI AU memungkinkan respons lebih luas dan efisien.

Selama ini, TNI AU telah menunjukkan kemampuan luar biasa dalam membantu penanggulangan bencana. Sebagai contoh, pada Mei 2024, Komando Pasukan Gerak Cepat (Kopasgar) TNI AU mengevakuasi lebih dari 100 warga dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, yang terdampak banjir dan tanah longsor.

Berkat dukungan aset udara, Kopasgar dapat menembus daerah terisolasi dan menyelamatkan nyawa. Selain itu juga

membantu pencarian di wilayah yang sulit diakses.

Selain mendukung evakuasi, TNI AU juga berperan dalam operasi pemadaman kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan. Pesawat dan helikopter TNI AU kerap digunakan mencegah kebakaran hutan dengan teknologi modifikasi cuaca (TMC), memadamkan api, serta menyalurkan bantuan.

Helikopter TNI AU H225M/Caraç juga digunakan membantu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam memadamkan api, membantu evakuasi, dan menyalurkan bantuan.

Adapun pesawat TNI AU C-130J Hercules digunakan untuk mengangkut bantuan dan berperan penting dalam misi-misi bantuan berskala besar. C-130J punya peran kunci dalam misi *air drop* bantuan kemanusiaan di Gaza, Palestina.

### Teknologi dan kolaborasi

Penggunaan teknologi satelit juga kian meningkat dalam operasi HADR untuk pemantauan jarak jauh dan komunikasi. Satelit *synthetic aperture radar* (SAR) memberi gambaran akurat meski kondisi visi tidak memungkinkan, seperti saat cuaca buruk atau pada malam hari.

Teknologi satelit juga mendukung komunikasi ketika infrastruktur komunikasi dari ratusan akibat bencana. Saat gempa bumi dan tsunami Palu (2018), satelit Lapan-A2 menjaga komunikasi di daerah terdampak untuk memungkinkan bantuan dalam merespons situasi darurat.

Bencana alam merupakan ancaman global yang melintasi batas negara. Dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan efektivitas respons, negara-negara harus memanfaatkan teknologi terbaru di bidang kegagantaraan dan antariksa, seperti UAV dan satelit.

Kolaborasi internasional menjadi kunci keberhasilan dalam operasi HADR karena tidak ada satu negara pun mampu menyiapkan dan menanggulangi bencana sendiri-sendiri.

Melalui kerja sama, negara-negara dapat berbagi sumber daya, pengetahuan, dan teknologi; meminimalkan dampak bencana; serta menyelamatkan lebih banyak nyawa.

Dalam situasi darurat, setiap menit begitu berharga. Oleh karena itu, sinergi antara teknologi dan kolaborasi lintas negara adalah solusi terbaik untuk meningkatkan keamanan dan kesejahteraan global berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan.

Contohnya, setelah gempa bumi Nepal (2015), Pemerintah Nepal menggunakan UAV untuk memetakan daerah berguna dalam operasi pencarian dan penyelamatan.

Misalnya, setelah kecelakaan helikopter yang melibatkan Presiden Iran Ebrahim Raisi, UAV Bayraktar Akinci dari Turki digunakan untuk menemukan lokasi kecelakaan.

Hal ini menegaskan efektivitas UAV dalam meningkatkan kesadaran situasional dan

### SURAT KEPADA REDAKSI

Rubrik ini menerima surat Anda mengenai kebijakan/layanan publik, konten artikel di halaman Opini maupun pemberitaan Kompas, serta masalah-masalah sosial kemasayarakatan dan konsumen yang tidak terselesaikan dalam prosedur formal.

Maksimal 300 kata atau 2.300 karakter. Surat pembaca dikirim kepada [suratpembaca@kompas.id](mailto:suratpembaca@kompas.id) atau ke Redaksi Kompas, Jl Palmerah Selatan 21, Jakarta 10270 dengan menuliskan nama lengkap, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi, disertai dengan fotokopi atau pindai identitas diri.

## "Stockpile" Emas Bank Sentral

Dunia mengalami masa ketidakpastian dan volatilitas yang sangat tinggi. Tidak terkecuali bidang ekonomi. Kalau kita jeli, negara-negara yang pemerintahnya cerdik, bank sentral mereka menambah *stockpile* emas dari waktu ke waktu untuk dipakai sebagai jangkar kekayaan negara dan tulang punggung kekuatan nilai tukar mata uang mereka, langsung maupun tidak langsung. Bank sentral mereka termonitor aktif melakukan pembelian emas dari waktu ke waktu.

Sebut saja Amerika Serikat, China, dan India. Mereka sadar bahwa emas adalah *safe haven* pelindung kekuatan ekonomi negara. Mereka sadar, cadangan devisa berupa mata uang asing saja tidak cukup aman untuk mengamankan kekuatan ekonomi karena nilai mata uang selalu mengalami volatilitas, bahkan penurunan daya beli.

Akibat *stockpiling* emas yang mereka lakukan, harga emas mengalami lonjakan tinggi di atas 2.600 dollar AS per troy ons. Itu harga emas yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya.

Akan halnya Indonesia, meski dikenal termasuk enambesar pemilik kandungan emas di bumiannya, *stockpile* emas yang disimpan Bank Indonesia (BI) jauh di bawah Amerika Serikat, China, dan India, bahkan lebih kecil daripada Lebanon.

Di pasar komoditas pun, tidak termonitor keaktifan BI menambah *stockpile* emas.

Sangat disayangkan kalau negara kita mempunyai *stockpile* emas yang tidak memadai. Di waktu-waktu sekarang ini, harga emas masih akan merambat naik. BI harus mempertimbangkan dengan serius untuk membuat strategi *stockpile* emas untuk ketahanan ekonomi Indonesia.

G EDWIN DEWAYANA  
Petukangan Selatan, Jakarta Selatan

## Menjaga Fungsi Kontrol Lembaga Legislatif

Abd Rohim Ghazali

Senior Fellow Maarif Institute; Direktur Eksekutif Inisiatif Demokrasi untuk Semua (InDesa)

Upaya presiden terpilih Prabowo Subianto mengajak semua pemimpin partai politik untuk bergabung dalam pemerintahan bisa menjadi pisau bermata dua.

**D**i satu sisi hal itu bermanfaat untuk menjalin kerja sama (gotong royong) dalam membangun bangsa. Di sisi lain, dalam konteks demokrasi, bisa menumpulkan fungsi kontrol lembaga legislatif.

Kalau kita menengok sejarah pascakerdekaan, beberapa pekan setelah proklamasi, muncul gejala otoritarianisme yang ditandai dengan bersatuinya sumber daya dan kemampuan seperti mobilitas udara. Ini sangat krusial untuk mengirim bantuan ke wilayah yang terisolasi akibat kerusakan infrastruktur.

Kolaborasi juga tecerminkan pada operasi penanggulangan bencana pascagempa bumi dan tsunami di Palu (2018). Kerja sama internasional dalam operasi HADR tidak sekadar berbagi sumber daya, tetapi juga berbagi pengetahuan dan pengalaman.

Dalam jangka panjang, kerja sama ini dapat meningkatkan kesiapsiagaan global dalam menghadapi bencana dan memperkuat kapasitas kolektif dalam merespons situasi darurat.

Bencana alam merupakan ancaman global yang melintasi batas negara. Dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan efektivitas respons, negara-negara harus memanfaatkan teknologi terbaru di bidang kegagantaraan dan antariksa, seperti UAV dan satelit.

Kolaborasi internasional menjadi kunci keberhasilan dalam operasi HADR karena tidak ada satu negara pun mampu menyiapkan dan menanggulangi bencana sendiri-sendiri.

Melalui kerja sama, negara-negara dapat berbagi sumber daya, pengetahuan, dan teknologi; meminimalkan dampak bencana; serta menyelamatkan lebih banyak nyawa.

Dalam situasi darurat, setiap menit begitu berharga. Oleh karena itu, sinergi antara teknologi dan kolaborasi lintas negara adalah solusi terbaik untuk meningkatkan keamanan dan kesejahteraan global berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan.

Contohnya, setelah gempa bumi Nepal (2015), Pemerintah Nepal menggunakan UAV untuk memetakan daerah berguna dalam operasi pencarian dan penyelamatan.

Misalnya, setelah kecelakaan helikopter yang melibatkan Presiden Iran Ebrahim Raisi, UAV Bayraktar Akinci dari Turki digunakan untuk menemukan lokasi kecelakaan.

Hal ini menegaskan efektivitas UAV dalam meningkatkan kesadaran situasional dan

an lembaga legislatif kembali berada di genggaman eksekutif. Kembali menjadi *rubber stamp* yang hanya tahu nyanyian lagu setuju.

Dalam konteks demokrasi yang sehat, parlemen berperan penting sebagai lembaga pengawas (*checks and balances*) terhadap eksekutif. Menurut Miriam Budardjo (1992:183), di antara fungsi DPR adalah mengontrol badan eksekutif, dalam arti menjaga agar semua tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.

Fungsi kontrol ini bertujuan memastikan kebijakan yang dilakukan oleh eksekutif, dalam arti menjaga agar semua tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.

Kalau kita menengok sejarah pascakerdekaan, beberapa pekan setelah proklamasi, muncul gejala otoritarianisme yang ditandai dengan bersatuinya sumber daya dan kemampuan seperti mobilitas udara. Ini sangat krusial untuk mengirim bantuan ke wilayah yang terisolasi akibat kerusakan infrastruktur.

Apa yang terjadi saat itu, dengan suasana berbeda, muncul kembali pada era Orde Baru. Lembaga legislatif yang dipilih rakyat melalui pemilu sudah ada. Akan tetapi, karena pemilu tidak dijalankan secara demokratis, keberadaan lembaga legislatif yang dihasilkannya berada di bawah kendali presiden.

Meminjam ungkapan Iwan Fals dalam lagunya, "Surat buat Wakil Rakyat", anggota legislatif saat itu hanya menjadi "paduan suara" yang "hanya tahu nyanyian lagu setuju."

Demokrasi semu semacam inilah yang harus kita hindari di era Prabowo Subianto. Jangan sampai terjadi, karena semua partai bergabung (berkoalisi) dengan pemerintah, keberadaan

memungkinkan prinsip-prinsip pemerintahan secara efektif.

Salah satu fungsi kontrol yang sangat penting adalah salah satu indikator penting dari demokrasi yang sehat dan mampu menegakkan prinsip-prinsip akuntabilitas.

Fungsi pengawasan lembaga legislatif sangat berperan dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh eksekutif. Oleh karena itu, fungsi pengawasan ini harus tetap terjaga dengan transparansi. Pengawasan ini perlu melibatkan partisipasi publik agar dapat mengontrol pemerintah secara efektif.

Kendala lain adalah kurangnya pengetahuan yang memadai tentang bidang-bidang yang harus diwasdi. Sesuai ketentuan, setiap anggota DPR akan mendapat bantuan serijs jika anggota parlemen lebih loyal kepada partainya daripada kepada konstituen mereka.

Dengan demikian, penyalahgunaan kekuasaan dapat dicegah. Pelaksanaan kebijakan pun diharapkan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

meningkat. Potensi terjadinya pemborosan atau korupsi juga semakin besar.

### Sejumlah kendala

Menjaga fungsi kontrol legislatif tidaklah mudah. Ada beberapa kendala yang dihadapi, antara lain,

pertama, tidak adanya partai oposisi di lembaga legislatif.

Sejak diluncurkan pada 2018, tidak ada partai oposisi di lembaga legislatif.

Sejak diluncurkan pada 2018, tidak ada partai oposisi di lembaga legislatif.

Sejak diluncurkan pada 2018, tidak ada partai oposisi di lembaga legislatif.

Sejak diluncurkan pada 2018, tidak ada partai oposisi di lembaga legislatif.

Sejak diluncurkan pada 2018, tidak ada partai oposisi di lembaga legislatif.

Sejak diluncurkan pada 2018, tidak ada partai oposisi di lembaga legislatif.

Sejak diluncurkan pada 2018, tidak ada partai oposisi di lembaga legislatif.

Sejak diluncurkan pada 2018, tidak ada partai oposisi di lembaga legislatif.

Sejak diluncurkan pada 2018, tidak ada partai oposisi di lembaga legislatif.

Sejak diluncurkan pada 2018, tidak ada partai oposisi di lembaga legislatif.

Sejak diluncurkan pada 2018, tidak ada partai oposisi di lembaga legislatif.

Sejak diluncurkan pada 2018, tidak ada partai oposisi di lembaga legislatif.

Sejak diluncurkan pada 2018, tidak ada partai oposisi di lembaga legislatif.

Sejak diluncurkan pada 2018, tidak ada partai oposisi di lembaga legislatif.

Sejak diluncurkan pada 2018, tidak ada partai oposisi di lembaga legislatif.

Sejak diluncurkan pada 2018, tidak ada partai oposisi di lembaga legislatif.

Sejak diluncurkan pada 2018, tidak ada partai oposisi di lembaga legislatif.

Sejak diluncurkan pada 2018, tidak ada partai oposisi di lembaga legislatif.

Sejak diluncurkan pada 2018, tidak ada partai oposisi di lembaga legislatif.

Sejak diluncurkan pada 2018, tidak ada partai oposisi di lembaga legislatif.

Sejak diluncurkan pada 2018, tidak ada partai oposisi di lembaga legislatif.

Sejak diluncurkan pada 2018, tidak ada partai oposisi di lembaga legislatif.

Sejak diluncurkan pada 2018, tidak ada partai oposisi di lembaga legislatif.

Sejak diluncurkan pada 2018, tidak ada partai oposisi di lembaga legislatif.

Sejak diluncurkan pada 2018, tidak ada partai oposisi di lembaga legislatif.

Sejak diluncurkan pada 2018, tidak ada partai oposisi di lembaga legislatif.

# US dockworkers launch strike after labor contract expires

**Move could cost US economy billions of dollars**

**John Biers**

**Agence France-Presse/New York, United States**

Dockworkers at major ports along the United States East and Gulf Coasts went on strike Tuesday after last-minute negotiations yielded no new labor contract, a stoppage expected to drag on the world's largest economy just ahead of the November presidential election.

The International Longshoremen's Association (ILA) said the walkout by its workers marks the first "coast wide strike in almost 50 years".

The shutdown would halt shipments of an array of goods from food to electronics and could cost the US economy billions of dollars a week.

"We are prepared to fight as long as necessary, to stay out on strike for whatever period of time it takes, to get the wages and protections against automation our ILA members deserve," Harold Daggett, who heads the 85,000-member union, said in a statement.

The ILA said it had "shut down all ports from Maine to Texas at 12:01 a.m. on Tuesday" after it rejected a final proposal from the US Maritime Alliance (USMX) shipping group.

"USMX brought on this strike when they decided to hold firm to foreign-owned ocean carriers earning billion-dollar profits" without compensating "workers who perform the labor that brings them their wealth," Daggett said.

USMX did not respond to a request for comment.

ILA members began walking the picket lines at 14 major ports on the East and Gulf coasts soon after the announcement.

In Boston, dockworkers

marched to the port carrying signs that read "no work without a fair contract," videos shared on social media showed.

CNN broadcast similar images from Philadelphia, while a *New York Times* video showed Daggett addressing workers on the picket lines. "We are making history," he said in New Jersey, as dockworkers held signs saying "Profit over people is unacceptable."

A possible stoppage had been telegraphed for months, with the odds rising in recent weeks as the two sides described themselves as far apart.

USMX said on Monday it was "hopeful" after the two sides exchanged counter-offers.

However, there was still no deal when the six-year contract expired at midnight.

The walkout marks the ILA's first since 1977 and follows other high-profile strikes at US automakers, Boeing and other employers.

The contract directly affects about 25,000 ILA members at 14 large US ports, including New York/New Jersey, Boston, Philadelphia, Savannah, New Orleans and Houston.

Oxford Economics estimated that the strike would dent US gross domestic product by \$4.5 billion to \$7.5 billion per week. The overall economic hit depends on the length of the strike, analysts say.

A lengthy strike could also pose political challenges.

US President Joe Biden, a close ally of organized labor, has so far ruled out federal intervention, citing the need to respect collective bargaining rights.

But business lobbies are sure to amplify calls for action if the strike drags out.

New York Governor Kathy Ho-

chul said on Monday port officials were scrambling to clear out as many items as possible before the impending stoppage.

Other ports, such as New Orleans and Savannah, had offered extended hours in recent days ahead of the deadline.

The union is pressing for protections against automation-related job loss and for hefty wage hikes after dockworkers kept providing essential services throughout the COVID-19 pandemic.

USMX said Monday its latest offer would "increase wages by nearly 50 percent, triple employer contributions to employee retirement plans, strengthen our health care options and retain the current language around automation and semi-automation".

Media reports say the ILA is asking for a 77 percent wage increase over six years.

"A port strike would paralyze US trade and raise prices at a time when consumers and businesses are starting to feel relief from inflation," said Erin McLaughlin, senior economist at the Conference Board.

"There's no easy Plan B. While shippers have already begun diverting some cargo to the West Coast, capacity for such alternative options are limited."

New York officials emphasized that any strike would not lead to shortages of basic goods.

"We don't anticipate shortages of essential goods anytime soon," Hochul said. "People do not need to rush out to the grocery store and stockpile goods like they did during the pandemic."

## Hot yields



Antara/Abdan Syakura

Members of the Berseri women farmers group (KWT) harvest bird's eye chili on Tuesday at a community garden in Central Cimahi district, Cimahi, West Java. The group empowers women in the agricultural sector to cultivate vegetable crops on idle land of around 100 square meters, producing up to 20 kilograms of bird's eye chili each harvest season.

## Firms urge G7 to unify cloud security norms

**Agence France-Presse**

**Washington**

A leading tech industry group on Tuesday called on Group of Seven (G7) nations to harmonize cloud security certification across the world's richest nations, in an effort to stoke cooperation and counter calls that data should stay within national borders.

Industry group, The Software Alliance (BSA), which represents tech giants including Microsoft and IBM, argues that its initiative would reduce compliance burdens for cloud service providers while maintaining robust security standards.

"We encourage governments to look at where their cloud requirements are effectively the same, but using different language," said Aaron Cooper, senior vice president of global pol-

icy at BSA.

Greater unity among G7 nations could also "hopefully lead to a recognition that localization doesn't aid security", he added. "But that's not specifically what this proposal is about."

The G7 nations are the United States, the United Kingdom, Canada, Japan and European Union member states France, Germany and Italy.

Reliance on cloud computing, instead of companies or governments running software onsite, is regarded as computing's new reality.

This has been further cemented in recent years due to the intense processing needed to deliver artificial intelligence capabilities, with few companies able to alone provide the data infrastructure necessary.

The growth of in-cloud com-

### To Whom It May Concern

As a commitment to transformation to be able to serve our customers through banking services, based on OJK Letter No. S-236/PB.02/2024 on 25 September 2024 regarding the Decision to Determine the Use of PT Bank SMBC Indonesia Tbk Business License, we hereby inform you that it is effective from the date of 2 October 2024:

**bank  
btpn**

**SMBC A MEMBER OF  
SMBC Group**

**PT BANK BTPN Tbk**

has changed the name into:

**SMBC**  
BANK SMBC INDONESIA

**PT Bank SMBC Indonesia Tbk**

In connection with this change, we need to convey that:

- All agreements/contracts with Customers, Debtors, Creditors, Business Partners and Vendors that have been signed and use the name PT BANK BTPN Tbk, remain valid.
- Check Books, Giro Bills, Savings Bills, Letters, Deposit Bills and Property which contain the company name and logo of PT BANK BTPN Tbk can still be used.
- Debit cards and credit cards containing the company name and logo of PT BANK BTPN Tbk can still be used to carry out transactions until the card's expiry period ends.
- Changes to the new company logo and name will be carried out in stages. The new company logo and name will be used in all PT Bank SMBC Indonesia Tbk communication media with third parties such as letterheads, envelopes, company stamps, websites, e-mail, announcements at branch offices and other related media.

**SMBC**  
Sincerely,  
Directors  
**PT Bank SMBC Indonesia Tbk**